

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

9

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						<input checked="" type="checkbox"/>							

Pemkot Genjot PAD dari Sektor PBB

Ajak Masyarakat Taat Pajak, Dimulai dari ASN

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggenjot perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandarlampung Yanwardi mengatakan untuk meningkatkan PAD Kota Tapis Berseri dari sektor PBB di saat pandemi Co-

vid-19, pihaknya meminta peran aktif aparat sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot dan masyarakat pada umumnya agar taat membayar pajak. "Kami telah membuat imbauan kepada dinas-dinas dan ASN yang ada di lingkungan Pemkot Bandarlampung untuk taat membayar PBB," katanya.

Tahun ini, kata Yanwardi, target PBB Kota Bandarlampung sebesar Rp170 miliar. Namun dari target tersebut baru terealisasi 12 persen atau sekitar Rp20 miliar.

Yanwardi juga mengajak masyarakat taat membayar pajak. Sebab, terangnya, hasil pembayaran PBB

maupun pajak lain banyak manfaatnya untuk masyarakat Kota Bandarlampung sendiri. Sebab, lanjutnya, setelah dihimpun oleh pemerintah, pajak akan dikeluarkan lagi untuk pembangunan infrastruktur, Bina Lingkungan (Biling), program kesehatan dan program lainnya.

"Jadi, jika taat dalam membayar pajak maka manfaat yang dirasakan akan banyak sekali dengan program-program Bu Wali Kota. Mari kita mulai dari lingkungan kita (Pemkot, Red) dulu, baru kita sosialisasikan dan ajak masyarakat melalui camat, lurah, RT dan Kaling," ujarnya.

Untuk pembayaran PBB, tambahnya, masih sama dengan tahun lalu yaitu tetap gratis untuk pembayaran di bawah Rp150 ribu. "PBB masih seperti tahun kemarin, karena Bu Wali Kota kita masih berpihak kepada masyarakat kecil. Dengan pandemi Covid-19 ini kita rasakan sendiri, cari uang susah," tuturnya.

Diketahui, jika mengacu peraturan tahun lalu untuk pembayaran di bawah Rp150 ribu gratis, pembayaran Rp150 ribu-Rp300 ribu mendapat diskon 50 persen, dan pembayaran Rp300 ribu-Rp500 ribu diskon 30 persen. (pip/c1/fik)